

DAFTAR PUSTAKA

A. BUKU

- Ali, Zainuddin. (2009). *Metode Penelitian Hukum*. Cetakan I. Jakarta: Sinar Grafika.
- Arikunto, Suharsimi. (2011). *Prosedur Penelitian Suatu Pendekatan Praktik*. Ed. rev. VI, cetakan XIV. Jakarta: Rhineka Cipta.
- Efendi, Jonaedi dan Johnny Ibrahim. (2016). *Metode Penelitian Hukum Normatif dan Empiris*. Edisi I. Depok: Prenadamedia Group.
- Hadi, M. Shubhan. (2019). *Hukum Kepailitan, Prinsip, Norma, Dan Praktik Di Pengadilan*. Cetakan II. Jakarta: Kencana Pranadamedia Group.
- Hartini, Rahayu. (2006). *Hukum Kepailitan*. Cetakan I. Malang: Penerbitan Universitas Muhammadiyah Malang.
- Hartini, Rahayu. (2007). *Hukum Kepailitan*. Edisi Revisi, Cetakan II. Malang: Penerbitan Universitas Muhammadiyah Malang.
- Ibrahim, Johnny. (2007). *Teori dan Metodologi Penelitian Hukum Normatif*. Cetakan III. Malang: Bayumedia Publishing.
- Kansil, C.S.T. (1989). *Pengantar Ilmu Hukum dan Tata Hukum Indonesia*. Cetakan VII. Jakarta: Balai Pustaka.
- M. Hadjon, Philipus. (1989). *Perlindungan Hukum Bagi Rakyat di Indonesia*. Cetakan I. Surabaya: Bina Ilmu.
- Mahmud, Marzuki Peter. (2007). *Penelitian Hukum*. Cetakan II. Jakarta: Kencana Penanda Media Group.
- Miru, Ahmadi dan Skka Pati. (2021). *Hukum Perikatan: Penjelasan Makna Pasal 1233 sampai 1456 BW*. Edisi I, cetakan VII. Depok: Rajawali Pers.
- Muhaimin. (2020). *Metode Penelitian Hukum*. Cetakan I. Mataram: Mataram University Press.
- Nating, Imran. (2005). *Peranan dan Tanggung Jawab Kurator Dalam Pengurusan dan Pemberesan Harta Pailit*. Edisi revisi, cetakan II. Jakarta: PT Raja Grafindo Persada.

- Prodjodikoro, Wirjono. (1995). *Asas-Asas Hukum Perdata*. Edisi VIII. Bandung: Sumur Bandung.
- Rusli, Tami. (2019). *Hukum Kepailitan di Indonesia*. Lampung: Universitas Bandar Lampung.
- Remy, Sjahdeni Sutan. (2002). *Hukum Kepailitan*. Jakarta: Pustaka Utama Graffiti.
- Soekanto, Soerjono. (2007). *Pengantar Penelitian Hukum*. Edisi VIII. Jakarta: UI Press.
- Subekti. (2005). *Hukum Perjanjian*. Cetakan V. Jakarta: Intermasa.
- Supramono, Gatot. (2004). *Perjanjian Utang Piutang*. Cetakan II. Jakarta: Kencana Prenada Media Group.
- Suyudi, Aria dan Eryanto Nugroho, Herni Sri Nurhayati. (2004). *Kepailitan di Negeri Pailit*. Cetakan II. Jakarta: Pusat Studi Hukum dan Kebijakan Indonesia.
- Tatak, Subagiyo Dwi Isetyowati Andayani, Endang Retnowati. (2017). *Pengantar Hukum Indonesia*. Cetakan IV. Surabaya: Pusat Pengkajian Hukum dan Pembangunan (PPHP) Fakultas Hukum Universitas Wijaya Kusuma Surabaya.
- Usman, Rachmadi. (2004). *Dimensi Hukum Kepailitan di Indonesia*. Edisi I. Jakarta: PT Gramedia Pustaka Utama.
- Usman, Rachmadi. (2008). *Hukum Jaminan Keperdataan*. Edisi XVIII. Jakarta: Sinar Grafika.

B. PERUNDANG-UNDANGAN

- Kitab Undang-Undang Hukum Perdata. (Lembar Negara Republik Indonesia Nomor 12 Tahun 1975).
- Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1985 tentang Mahkamah Agung. (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1985 Nomor 73, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1985 Nomor 3316).
- Undang-Undang Nomor 42 Tahun 1999 Tentang Jaminan Fidusia. (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 168, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3889).
- Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2003 tentang Badan Usaha Milik Negara. (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 70, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4297).

Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2004 tentang Kejaksaan Republik Indonesia. (Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 67 Tahun 2004).

Undang-Undang Nomor 37 Tahun 2004 tentang Kepailitan dan Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang. (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 131, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4443).

Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas. (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 106, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4756).

Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2021 tentang Kejaksaan Republik Indonesia. (Lembar Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 298, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6755).

Peraturan Menteri Negara Badan Usaha Milik Negara Nomor: PER-05/MBU/09/2022 Tentang Penerapan Manajemen Risiko Pada Badan Usaha Milik Negara. (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 835).

C. JURNAL

Esther, Arihta Tarigan. (2021). Urutan Kreditur yang Didahulukan Dalam Pelunasan Piutang Pada Perkara Kepailitan. *Salam*. 8(2):615-628. DOI: <https://doi.org/10.15408/sjsbs.v8i2.2036>.

Fatimah, Siti Citra. N. (2023). *Tinjauan Hukum Penerapan Hak Mendahulu Utang Pajak Dalam Perkara Kepailitan PT Industries Badja Garuda Berdasarkan Undang-Undang Nomor 37 Tahun 2004 Tentang Kepailitan dan Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang*. *Dharmasiswa*. 2(3)(35):1505 – 1518.

Hartato, Depi. (2020). *Penyelesaian Tunggakan Rekening Air Perusahaan Daerah Air Minum (PDAM) Kota Padang Oleh Jaksa Selaku Pengacara Negara*. Padang: UNES Law Review. 3(1):31-39. DOI: <https://doi.org/10.31933/unesrev.v3i1.143>.

Kusna, Putra Suriadi. (2018). *Kajian Yuridis Terhadap Piutang Tidak Tertagih Atas Perjanjian Penjualan Produk Secara Kredit Pada Badan Usaha Milik Negara (BUMN)*. *Asy-Syari'ah*. 20 (1):71-84. DOI: <https://doi.org/10.15575/as.v20i1.2986>

D. SKRIPSI, TESIS, DISERTASI

Niffari, Hanifah. (2012). *Akibat Hukum Bagi Kreditur Yang Tidak Mendaftarkan Piutangnya Kepada Kurator Untuk Dilakukan Pencocokan Piutang Pada Kasus Putusan Mahkamah Agung No.192 K/PDT.SUS/2011*. Skripsi. Depok: Universitas Indonesia.

Rahayu. (2009). *Pengangkutan Orang. (Studi tentang perlindungan hukum terhadap barang bawaan penumpang di PO. Rosalia Indah)*. Tesis. Surakarta: Universitas Muhammadiyah Surakarta.

Sabsyiesty, Kma. (2007). *Wanprestasi Pada Perjanjian Sewa Kapal (Bareboat Charter) Yang Dibuat Secara Tidak Tertulis*. Skripsi Thesis. Surabaya: Universitas Airlangga.

E. LAIN-LAIN

Wawancara dengan Akbar, Bayu Maulana. Kepala Subseksi (Kasubsi) Bagian Pertimbangan Hukum Bidang Perdata dan Tata Usaha Negara Kejaksaan Negeri Surabaya Mengenai Data Dokumen PT SIER di Kejaksaan Negeri Surabaya. Dilaksanakan pada tanggal 9 Desember 2023.

Wawancara dengan Rudolf, Jemmy Manurung. Kepala Subseksi (Kasubsi) Bagian Perdata dan Tata Usaha Negara Bidang Perdata dan Tata Usaha Negara Kejaksaan Negeri Surabaya Mengenai Data Dokumen PT SIER di Kejaksaan Negeri Surabaya. Dilaksanakan pada tanggal 9 Desember 2023.

Wawancara dengan Kusuma, Diajeng Ningrum. Jaksa Fungsional Bidang Perdata dan Tata Usaha Negara Kejaksaan Negeri Surabaya Mengenai Data Dokumen PT SIER di Kejaksaan Negeri Surabaya. Dilaksanakan pada tanggal 9 Desember 2023.